

**GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK:  
STUDI KASUS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU**

**Mukhammad Aras Bin Mannek<sup>1</sup> & Samihah Khalil @ Halim<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (UNISI-TEMBILAHAN),

<sup>2</sup>Pasca sarjana School of Government Universiti Utara Malaysia

Email: [mukhammadaras@gmail.com](mailto:mukhammadaras@gmail.com)

**Abstract**

*The study objective is to reveal the relation between the village head leadership style and financial factor and its effect to the quality of public service in Indragiri Hilir Regency, Riau Province. The leadership style of the village heads of the Indragiri Hilir Regency is studied because the villages do not imply the qualified public service standard. The villages' condition is related with leadership style and financial factor and its relation to the public service. The village heads' leadership style is the one that moves the improvement of public service, and theoretically based on situational leadership theory from Blanchard. On the other hand, financial factor supports the performance of qualified public service. This qualitative study used descriptive methods, particularly survey. Data was collected by interviewing and documentation study. Interview revealed respondents' perception about the relation between the leadership style and public service, while documentation study revealed information and data on finance and its relation with public service. This study analysed primary quantitative data based on interview and secondary qualitative data from documentation study. Quantitative data is analysed in order to test the hypothesis of the relation between leadership style and public service using Spearman rho correlation test and chi square test. Meanwhile the effect of leadership style and financial factor to the quality of public service is measured by regression technique using T-test, F-test, and coefficient of determination. The population, the number of villages is 170, 17 of which are used as sample, with 646 respondents representing 5780 people in the 170 villages. The result of this study is expected to theoretically contribute to the development of public administration study and for the improvement of the quality of public service effectively. Practically, this study can give recommendation for the local administration and village heads in improving the quality of public service in Indragiri Hilir Regency, Riau Province. The public service can be improved by training and conducting workshop in technical and managerial skills. It also can be a model of leadership style in order to improve effective public service in Indragiri Hilir Regency.*

**Key words:** *Leadership Style, Situational Leadership Theory, Public Service Quality, Financial Factor*

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan dan pengaruh diantara gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan faktor dana terhadap Mutu Pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Gaya Kepemimpinan yang dikaji adalah gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam kondisi desa Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang sekarang tidak menggalakkan kepada mutu Pelayanan publik secara berkesan. Kondisi desa tersebut berhubungkait dengan gaya Kepemimpinan dan faktor dana terhadap mutu Pelayanan publik di desa. Gaya Kepemimpinan kepala desa adalah gaya dalam*

*Kepemimpinan yang menggerakkan proses penyelenggaraan terhadap mutu Pelayanan publik, dan gaya Kepemimpinan tersebut secara spesifik bertumpu pada teori Kepemimpinan situasional (situational leadership theory), dari teori Blanchard, sedangkan factor dana menjadi factor yang memberi sokongan terhadap proses penyelenggaraan terhadap mutu Pelayanan publik. Kaedah kajian yang diguna pakai dalam kajian ini ialah kaedah deskriptif kuantitatif dengan kaedah survey. Pengutipan data dilakukan berdasarkan soal selidik dan dokumen. Soal selidik diguna pakai untuk menelaah persepsi responden terhadap hubungan gaya Kepemimpinan dengan mutu Pelayanan publik, dan dokumen bagi mengumpulkan data dan informasi mengenai factor dana mempengaruhi mutu Pelayanan publik. Kajian ini menganalisis data kuantitatif dan data kualitatif iaitu data primer kuantitatif hasil soalselidik dan data sekunder kualitatif hasil dokumen. Data kuantitatif dianalisis bagi menguji hipotesis hubungan gaya Kepemimpinan dan mutu Pelayanan publik digunakan ujian korelasi Spearman rho dan uji-chi square. Pengujian hipotesis pengaruh gaya Kepemimpinan dan factor dana terhadap mutu Pelayanan publik digunakan teknik regresi dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi. Populasi desa kajian sebanyak 170 desa dengan sampel kajian ditetapkan 17 desa. Responden ditetapkan sebanyak 646 orang bagi 5780 orang pada 170 desa populasi tersebut. Hasil penyelidikan ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu administrasi negara dan terutama masukan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu Pelayanan publik secara efektif. Secara praktis sebagai masukan pemerintah daerah dan desa terhadap upaya Kepemimpinan kepala desa meningkatkan mutu Pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Peningkatan mutu Pelayanan publik dapat dilakukan melalui training & workshop untuk meningkatkan technical skill & managerial skill. Selain itu memberikan kontribusi model Kepemimpinan kepala desa bagi meningkatkan mutu Pelayanan publik yang efektif di Kabupaten Indragiri Hilir Riau.*

**Kata kunci:** Gaya Kepemimpinan, Teori Kepemimpinan Situasional, Mutu Pelayanan Publik, Klasifikasi Desa, Faktor Dana

## **Pendahuluan**

Dalam lingkup kepemimpinan desa, maka gaya kepemimpinan Kepala Desa diarahkan untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi pemerintah desa. Gaya kepemimpinan dari seorang Kepala Desa bertanggungjawab menjalankan tugas pokok pemerintahan. Dalam menjalankan tugas tersebut mesti dilaksanakan secara merata untuk memberikan pelayanan publik kepada publik yang bermutu.

Gaya kepemimpinan dalam birokrasi pelayanan publik sangat berpengaruh dalam menentukan hasil prestasi kerja dalam melakukan pelayanan publik kepada publik. Kerana itu gaya kepemimpinan dalam birokrasi suatu institusi pemerintah desa untuk melaksanakan pelayanan publik kepada publik. Gaya kepemimpinan merupakan faktor yang menentukan kejayaan menjalankan organisasi birokrasi pemerintah desa. Organisasi birokrasi pemerin-

tah desa berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada publik yang wujudkan melalui penerapan gaya kepemimpinan suatu organisasi desa. Oleh sebab itu pemberian pelayanan publik secara bermutu kepada publik bergantung pada prestasi kerja gaya kepemimpinan suatu organisasi.

Menurut laporan PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*), tahun 2010 suatu badan konsultasi berbasis di Hongkong menyatakan buruknya birokrasi menjadi problem terbesar yang dihadapi Asia, salah satunya Indonesia disamping Cina, Vietnam dan India. Dwiyanto (1995) menyatakan penilaian dari birokrasi itu buruk boleh diukur prestasi kerja birokrasi publik dalam aspek: (a). produktiviti dari peringkat kecakapan, keberkesanan dan indikator prestasi kerjanya. (b). kualiti pelayanan publik yang berkaitan dengan faktor kepuasan yang diterima pengguna. (c). responsiviti untuk

## ***Gaya Kepemimpinan Kepala Desa ...***

memenuhi kebutuhan pokok dan prioritas pelayanan publik. Kumorotomo (1996) menegaskan buruknya birokrasi harus diukur dari aspek kecakapan, keberkesanan, keadilan dan daya tanggap. Pendapat Salim & Woodward (1992) melihat prestasi kerja dari aspek pertimbangan ekonomi, kecakapan, keberkesanan dan persamaan dalam memberikan pelayanan publik kepada publik. Dalam aspek fisik pelayanan publik Zeithaini, Parasuraman, dan Berry (1990) mengemukakan bahwa prestasi pelayanan publik sepatutnya dilihat dari indikator fisik sahaja. Tersedianya gedung representatif dan pelbagai fasiliti yang memberikan akses pelayanan publik kepada masyarakat secara bermutu.

Berdasarkan aspek administrasi negara penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tanggungjawab sebuah negara secara konstitusional. Menurut Holle (2011), Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah memberi amanah pelaksanaan pelayanan publik, kerana pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar publik (*social rights / fundamental rights*). Seterusnya menyatakan Landasan asas pelaksanaan pelayanan publik seperti tercantum dalam sesyen 18 A ayat (2) dan sesyen 34 ayat (3) UUD 1945, secara nyata dan tegas mengatur pelaksanaan pelayanan awan sebagai wujud hak sosial dasar (*the right to receive*). Sebagai pemberian tugas asas, maka penolakan atau penyimpangan pelayanan publik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Pasca reformasi tahun 1997 birokrasi pemerintah menghendaki untuk memberikan pelayanan publik secara bermutu, maka dibuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam perspektif undang-undang dan politik penerapan isu gaya kepemimpinan telah diperkenalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Antara kebijakan kesejahteraan rakyat untuk peningkatan pelayanan publik dengan dinamika otonomi daerah. Dinamika otonomi daerah mempunyai dampak pada gaya kepemimpinan di daerah mengenai pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi asas penyelenggaraan otonomi daerah dalam sistem desentralisasi pemerintah. Dalam sistem desentralisasi ini penerapan gaya kepemimpinan daerah mengikuti gaya kepemimpinan

secara demokrasi. Penerapan gaya kepemimpinan ini diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di desa. Kepemimpinan pemerintah sepatutnya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dalam kebutuhan pokok dari masyarakat (Ridwan, 2010). Dalam kepemimpinan birokrat pemerintah kepemimpinan kepala desa bertanggungjawab terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Karena kepemimpinan Kepala Desa merupakan bahagian integral dari kepemimpinan birokrat pemerintah pusat.

Gaya kepemimpinan dalam konteks konstitusi Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945) adalah upaya mencapai tujuan negara. Faktor gaya kepemimpinan merupakan faktor mencapai tujuan negara dalam wujud peningkatan mutu pelayanan publik. Tugas pokok mencapai tujuan negara antaranya adalah negara wajib memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum bermakna melaksanakan pelayanan publik yang bermutu. Faktor gaya kepemimpinan adalah merupakan faktor peningkatan mutu pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan umum.

Penerapan gaya kepemimpinan yang bertujuan peningkatan mutu pelayanan publik telah dikeluarkan kebijakan publik oleh pemerintah pusat, diantaranya adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik bermakna untuk meningkatkan proaktif gaya kepemimpinan melaksanakan mutu pelayanan publik. Penerapan gaya kepemimpinan melalui mutu pelayanan publik dalam mencapai tujuan negara telah memiliki landasan hukum.

### **Tinjauan Pustaka** ***Gaya Kepemimpinan***

Gaya kepemimpinan dalam konteks Kepemimpinan situasional lebih fokus pada aspek mempengaruhi bawahan dari aspek kematangan dan kemampuan mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi sangat memiliki peranan dalam menentukan mencapai tujuan. Organisasi sebagai alat dan melakukan tindakan organisasi mencapai tujuannya. Aktivitas organisasi selalu mengarah pada suatu perubahan yang digerakkan oleh kepemimpinan. Peran kepemimpinan menggerakkan organisasi dengan perilaku atau

gaya kepemimpinan untuk tujuan organisasi. Tujuan organisasi hanya dapat dicapai kerana peranan perilaku atau gaya kepemimpinan suatu organisasi. Tujuan organisasi pada tahapan pemerintah desa yang ingin dicapai melalui peningkatan mutu pelayanan publik melalui suatu peranan dari kepemimpinan kepala desa.

Kepemimpinan dalam organisasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur tentang Pemerintah Daerah dan mengatur organisasi pemerintah desa. Sebuah organisasi meletakkan peranan dan perilaku kepemimpinan sebagai faktor penentu untuk mewujudkan tujuan organisasi. Organisasi desa adalah merupakan unit paling bawah dalam struktur pemerintah di Indonesia. Desa merupakan kesatuan masyarakat dimana pelayanan publik boleh dilakukan melalui peranan atau perilaku kepemimpinan. Karena peranan kepemimpinan kepala desa menjadi faktor penting yang menggerakkan organisasi pemerintah desa.

Korinan (dalam Hersey, 1986) menjelaskan kepemimpinan yang berkesan manakala gaya kepemimpinan mempunyai korelasi dengan kematangan pengikut. Dikemukakan Hersey (1986) gaya kepemimpinan merupakan perilaku seseorang berupaya mempengaruhi aktivitas orang lain. Gaya kepemimpinan situasional menghendaki gaya yang berbeda dalam situasi organisasi yang berbeda. Perubahan Gaya menyesuaikan kemampuan, gaya kepemimpinan yang berubah tidak sama dengan perubahan kemampuan yang statis. Situasi organisasi yang berbeda, meskipun nama struktur, tugas dan fungsi organisasi sama. Karena itu pada level organisasi yang sama dalam situasi anggota yang berbeda diperlukan gaya yang berbeda. Situasional adalah kematangan (*maturity*) yang mencakup kemampuan dan kemaun bawahan (*subordinate*).

Menurut Yulk (1998) menyatakan perilaku kepemimpinan ditentukan oleh suasana lapangan untuk menghasilkan kinerja dan kepuasan kerja bawahannya. Hersey dan Blanchard (1996) mengatakan gaya kepemimpinan tidak untuk semua kondisi dalam organisasi tetapi gaya kepemimpinan efektif yang mengakomodasi lingkungannya (pengikut, atasan dan rekan kerjanya). Pemimpin mempunyai kewibawaan, kekuasaan untuk memerintah orang lain dan mempunyai kewajiban

serta tanggungjawab terhadap apa yang telah mereka lakukan.

### **Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa, Roh (1987) menyatakan pelayanan publik adalah "... any services available to the public whether peovided publicly (as is a museum) or privately (as is a restautan meal). Pengertian any services berhubungan dengan barang dan jasa dalam melaksanakan pengurusan publik. Bentuk pelayanan publik yang diberikan boleh berbentuk barang dan jasa diserahkan secara individu, kumpulan dan organisasi.

Ivancevich, Lorenzi dan Crosby (Ratminto & Winarsih (2006) menjelaskan bahwa pelayanan adalah produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan usaha manusia yang menggunakan sarana (Ratminto & Winarsih (2006). Seterusnya Grooroos (Wayan,2007) menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan aktivitas sifatnya tidak kasat mata dan sebagai interaksi konsumen dengan karyawan atau organisasi yang memberi pengurusan publik. Ciri pokok dari pelayanan publik tidak kasat mata dan tidak dirasakan konsumen maupun pemberi pelayanan publik. DeVery menyatakan pelayanan publik dari kata *service* dalam dua pengertian yaitu "...the attendance of an inferior upon a superior atau "to be useful". Davidow Uttal dalam (Endang Wiryatmi Trilestari, 2003) menyatakan bahwa pelayanan publik itu merupakan suatu usaha untuk mempertinggi kepuasan pelanggan. Perspektif kata publik sebagai suatu publik-polis dan semua penduduk berpartisipasi di dalamnya. Pengertian publik semua penduduk suatu komunitas yang berpartisipasi dalam pemerintahan (Endang Wiryatmi Trilestari, 2003).

Pelayanan publik pada hakikat adalah pemberian pengurusan kepada publik untuk pemenuhan pelayanan publik yang merupakan perwujudan kewajiban dari pemerintahan. Pelayanan publik sifatnya mendasar mengenai pemenuhan kebutuhan pokok oleh pemerintahan. Pengertian pelayanan publik dalam kajian ini terhad pada pengurusan publik antaranya bentuk perizinan, kartu tanda penduduk, izin mendirikan bangunan, izin tempat usaha. Pelayanan publik publik ini merupakan

## *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa ...*

pengurusan publik yang dilakukan oleh pemerintahan pada pemerintahan peringkat desa. Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat desa merupakan kewajiban pemerintahan tingkat desa. Kepala desa sebagai pemegang jabatan kuasa berkewajiban memberikan pelayanan publik di kawasan desanya. Pengurusan publik merupakan tanggungjawab dari kepemimpinan Kepala Desa dalam memberikan pelayanan publik kepada publik secara bermutu.

Mutu pelayanan publik sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan, (2010) adalah bertujuan untuk memberikan rasa kepuasan warga. Pencapaian kepuasan itu diharapkan dengan cara melakukan peningkatan mutu daripada pelayanan publik. Rangkuti (2006) menjelaskan bahwa kualiti perkhidmatan sebagai penyampaian jasa yang melebihi tingkat kepentingan pelanggan perkhidmatan. Kualiti perkhidmatan menurut Tjiptono (2007) upaya penyampaian jasa untuk memenuhi keperluan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Gronroos (1984) menjelaskan kualiti perkhidmatan dengan mengelompokkan ke dalam 2 katagori kualiti, yaitu kualiti teknis dan kualiti fungsional. Mengenai apa yang diperoleh pelanggan adalah merupakan kualiti teknis, sedangkan kualiti fungsional lebih menjelaskan kepada keprihatinan daripada perkhidmatan. Kualiti perkhidmatan merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kerana itu kualiti perkhidmatan berhubungan dengan pemenuhan harapan atau keperluan pelanggan.

Peranan kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan merupakan faktor yang meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan publik. Keberhasilan maupun kegagalan organisasi sangat tergantung dari kualitas kepemimpinan dalam organisasi itu (Siagian,1998). Dalam perspektif negara kesejahteraan, gaya kepemimpinan yang diterapkan pemerintah wajib mewujudkan kesejahteraan rakyat dan peranan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah meningkatkan kesejahteraan (Ridwan, 2010). Sistem administrasi negara peran kepemimpinansangat penting, karena faktor kepemimpinan diyakini sebagai penentu arah polisi/dasar publik bangsa dan negara. Gaya kepemimpinan dari perspektif administrasi negara adalah melakukan berbagai jenis

pelayanan publik yang bermutu yang diperlukan rakyat (Sinambela et al. 2010). Gaya kepemimpinan terhadap pelayanan publik adalah gaya penyelenggaraan organisasi publik itu sendiri (Syafiie,2003).

Fungsi utama dari fungsi kepemimpinan institusi desa adalah untuk memberikan pelayanan publik di desa. Fungsi kepemimpinan Kepala Desa menjadi urgen karena memberikan keputusan untuk pelayanan publik bagi kepentingan warga desa. Salah satu fungsi kepemimpinan yang hakiki adalah pimpinan sebagai penentu arahmencapai tujuannya sesuai dengan pemanfaatan segala sarana dan prasarana yang dirumuskan pimpinan sebagai penentu strategi dan taktik organisasi. Pada level kepemimpinan Kepala Desa sebagai pimpinan penentu arah organisasi dalam kepemimpinannya bertumpu pada pengambilan keputusan yang bersifat teknis. Semua bentuk keputusan kepemimpinan Kepala Desa diarahkan pada semua bentuk pelaksanaan pelayanan publik.

Masalah krusial bangsa adalah mengenai kepemimpinan. Peranan pemimpin di era global sangat dominan untuk menjembatani masalah yang dihadapi organisasi (Sanusi, 2009). Apapun peranan yang dimiliki pemimpin adalah menuntaskan semua bentuk pelayanan publik. Aktivitas pelayanan publik merupakan tugas pokok yang dihadapi oleh organisasi apapun, sama ada organisasi dalam bentuk institusi seperti institusi kepemimpinan pemerintahan desa. Peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dalam posisi tertentu (Rivai, 2009).

Pada asasnya kepemimpinan Kepala Desa merupakan pimpinan dalam katagori pemimpin menengah ke bawah, namun dalam pengambilan keputusannya pada keputusan sifat teknis semata. Dalam setiap kepemimpinan Kepala Desa selalu memberikan pelayanan publik yang ditetapkan melalui keputusan teknis. Ketetapan Kepala Desa selalu bersifat melaksanakan ketetapan yang lebih tinggi dari pemerintahan.

Penerapan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh dalam memberikan mutu pelayanan publik kepada masyarakat desa secara bermutu di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kawasan ini sejak tahun 2011 telah memiliki sebanyak 170 desa. Desa diklasifikasi sebagai desa miskin/tertinggal sebanyak 85 desa, desa berkembang 65 desa, dan desa maju 20 desa (BMPMPD

INHIL,2011).

**Tabel 1. Korelasi antara Gaya Instruksi, Gaya Konsultasi, Gaya Partisipasi dan Gaya Delegasi dengan Mutu Pelayanan Publik**

			Correlations				
			X1	X2	X3	X4	Y
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1,000	,856**	,835**	,768**	,758**
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,000	,000
		N	507	507	507	507	507
	X2	Correlation Coefficient	,856**	1,000	,840**	,758**	,754**
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,000	,000
		N	507	507	507	507	507
	X3	Correlation Coefficient	,835**	,840**	1,000	,799**	,780**
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,000	,000
		N	507	507	507	507	507
	X4	Correlation Coefficient	,768**	,758**	,799**	1,000	,733**
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	.	,000
		N	507	507	507	507	507
	Y	Correlation Coefficient	,758**	,754**	,780**	,733**	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	.
		N	507	507	507	507	507

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed)

Desa miskin terjadi disebabkan karena faktor ekonomi dan sosial. Sedangkan Desa berkembang yang sudah mulai tumbuh secara ekonomi dan social, dan Desa maju telah memiliki kondisi ekonomi dan sosial lebih baik. Kondisi buruk pelayanan publik memiliki hubungan gaya kepemimpinan Kepala Desa. Kerana itu gaya kepemimpinan Kepala Desa mempunyai pengaruh terhadap mutu pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa dengan mutu pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Populasi desa kajian adalah 170 desa. Sampel kajian ditetapkan 17 desa, dan responden 646 orang dari 5780 orang pada 170 desa populasi tersebut. Kaedah penyelidikan ini menggunakan jenis penyelidikan kuantitatif dengan metode *survey*. Gaya kepemimpinan situasional kepala desa secara spesifik bertumpu pada *Situational Leadership Theory* (Teori Kepemimpinan Situasional), suatu teori yang dikembangkan oleh *Blanchard*.

Pengumpulan data dilakukan melalui: angket, dan dokumen. Angket untuk menelaah persepsi responden terhadap hubungan gaya kepemimpinan dengan mutu pelayanan publik. Dokumentasi untuk mengumpulkan data mengenai sumber dana yang menjadi faktor dana mempengaruhi variabel dependen.

Data kuantitatif dianalisis bagi menguji hipotesis hubungan gaya Kepemimpinan dan

mutu Pelayanan publik digunakan ujian korelasi *Spearman rho* dan uji-*chi square*. Pengujian hipotesis pengaruh gaya Kepemimpinan dan factor dana terhadap mutu Pelayanan publik digunakan teknik regresi dengan uji *t*, uji *F* dan *koefisien determinasi*.

**Hasil dan Pembahasan**

**Hasil Pengujian Pertama**

Untuk melakukan uji hipotesis korelasi gaya kepemimpinan dengan mutu pelayanan publik dapat dilakukan dengan korelasi dengan teknik *Spearman rho* terhadap masing-masing gaya instruksi, gaya konsultasi, gaya partisipasi dan gaya delegasi dengan mutu pelayanan publik seperti dalam tabel 1.

1. Hipotesis: Terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan instruksi (X1) dengan mutu pelayanan publik (Y)

**Tabel 2. Hasil Ujian Chi-square Hubungan antara Kepemimpinan Kepala Desa (X1) dengan Mutu Pelayanan Publik (Y)**

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3527,737 <sup>a</sup>	1813	,000
Likelihood Ratio	1461,138	1813	1,000
Linear-by-Linear Association	284,315	1	,000
N of Valid Cases	507		

a. 1900 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,00

Berdasarkan tabel 1, uji korelasi gaya

**Gaya Kepemimpinan Kepala Desa ...**

kepemimpinan instruksi (X1) dengan mutu pelayanan publik (Y) mempunyai hubungan yang kuat ( $r = .758$ ). Hasil ujian chi-square menunjukkan nilai sig  $.00 < .05$ , berjaya menolak  $H_0$ . Dengan demikian hipotesis ( $H_a$ ) diterima, bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan instruksi (X1) dengan mutu pelayanan publik (Y). Hasil ujian chi-square ditunjuk pada tabel (2).

- Hipotesis: Terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan konsultasi (X2) dengan mutu pelayanan publik (Y)

Berdasarkan tabel 1, uji korelasi gaya kepemimpinan konsultasi (X2) dengan mutu pelayanan publik (Y) mempunyai hubungan yang kuat ( $r = .754$ ). Hasil ujian chi-square menunjukkan nilai sig  $.00 < .05$ , berjaya menolak  $H_0$ . Dengan demikian hipotesis ( $H_a$ ) diterima, bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan konsultasi (X2) dengan mutu pelayanan publik (Y). Hasil ujian chi-square ditunjuk pada tabel (3).

**Tabel 3. Hasil Ujian Chi-square Hubungan antara Gaya Konsultasi (X2) dengan Mutu Pelayanan Publik (Y)**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3634,216 <sup>a</sup>	1764	,000
Likelihood Ratio	1442,627	1764	1,000
Linear-by-Linear Association	277,744	1	,000
N of Valid Cases	507		

a. 1850 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,00

- Hipotesis: Terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan partisipasi (X3) dengan mutu pelayanan publik (Y)

**Tabel 4. Hasil Ujian Chi-square Hubungan antara Gaya Partisipasi (X3) dengan Mutu Pelayanan Publik (Y)**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5084,963 <sup>a</sup>	2597	,000
Likelihood Ratio	1672,208	2597	1,000
Linear-by-Linear Association	281,302	1	,000
N of Valid Cases	507		

a. 2700 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,00

Berdasarkan tabel 1, uji korelasi gaya kepemimpinan partisipasi (X3) dengan mutu pelayanan publik (Y) mempunyai hubungan

yang kuat ( $r = .780$ ). Hasil ujian chi-square menunjukkan nilai sig  $.00 < .05$ , berjaya menolak  $H_0$ . Dengan demikian hipotesis ( $H_a$ ) diterima, bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan partisipasi (X3) dengan mutu pelayanan publik (Y). Hasil ujian chi-square ditunjuk pada tabel (4).

- Hipotesis: Terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya Kepemimpinan delegasi (X4) dengan mutu pelayanan publik (Y)

Berdasarkan tabel 1, uji korelasi gaya kepemimpinan delegasi (X4) dengan mutu pelayanan publik (Y) mempunyai hubungan yang kuat ( $r = .733$ ). Hasil ujian chi-square menunjukkan nilai sig  $.00 < .05$ , berjaya menolak  $H_0$ . Dengan demikian hipotesis ( $H_a$ ) diterima, bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan delegasi (X4) dengan mutu pelayanan publik (Y). Hasil ujian chi-square ditunjuk pada tabel (5).

**Tabel 5. Hasil Ujian Chi-square Hubungan antara Gaya Delegasi (X4) dengan Mutu Pelayanan Publik (Y)**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	2318,459 <sup>a</sup>	1127	,000
Likelihood Ratio	1197,743	1127	,070
Linear-by-Linear Association	249,387	1	,000
N of Valid Cases	507		

a. 1199 cells (99,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,00

**Hasil Pengujian kedua: Pengaruh 4 Sub Variabell Gaya Kepemimpinan (X) ke atas Mutu Pelayanan publik (Y)**

Hipotesis kajian ini adalah seperti berikut:

- Hipotesis: Terdapat Pengaruh yang Siginifikan antara Gaya Instruksi (X1) dengan Mutu Pelayanan publik (Y).
- Hipotesis: Terdapat Pengaruh yang Siginifikan antara Gaya Kosultasi (X2) dengan Mutu Pelayanan publik (Y).
- Hipotesis: Terdapat Pengaruh yang Siginifikan antara Gaya Partisipasi (X3) dengan Mutu Pelayanan publik (Y)
- Hipotesis: Terdapat Pengaruh yang Siginifikan antara Gaya Delegasi (X4) dengan Mutu Pelayanan publik (Y).

**Hasil Pengujian Hipotesis ketiga: Pengaruh Faktor Dana (W) ke atas Mutu Pelayanan publik (Y)**

Hipotesis kajian ini adalah

Hipotesis: Terdapat Pengaruh yang Siginifikan antara Faktor Dana (W) dengan Mutu Pelayanan publik (Y).

Hasil Pengujian Hipotesis pertama dan kedua ini bertujuan bagi mengetahui pengaruh daripada 4 sub variabel Gaya Kepemimpinan (X) terhadap Mutu Pelayanan publik (Y) dan pengaruh Faktor Dana (W) terhadap Mutu Pelayanan publik (Y). Akan tetapi sebelum ujian regresi dilakukan maka dibuat terlebih dahulu beberapa ujian asumsi regresi seperti mana dijelaskan di bawah ini:

**Asumsi Regresi**

Sebelum ujian regresi dibuat maka terlebih dahulu dipastikan kolineariti, homoskedastisiti, normaliti dan lineariti, daripada variabel bebas.

**Ujian kolineariti**

Pemeriksaan kolineariti daripada variabel Gaya Instruksi (X1) Gaya Kosultasi (X2) Gaya Partisipasi (X3) Gaya Delegasi (X4) dan variabel independen Faktor Dana (W) sebagai variabel independen adalah diperlukan bagi mengenal pasti merupakan variabel predictor yang sudah direka itu sejatinya berfungsi sebagai variabel independen yang bersendirian. Setelah semua data variabel independen (predictor) itu dianalisis melalui program SPSS version 20.0 maka keputusannya boleh dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6. Hasil Ujian Kolineariti antara Variabel Bebas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Instruksi	,198	5,056
Kosultasi	,200	4,990
Partisipasi	,170	5,874
Delegasi	,245	4,074
Faktor Dana	,949	1,054

a. Dependent Variable: Pelayanan publik / Yanpub

Daripada tabel di atas boleh diketahui bahwa nilai *tolerance* yang mengukur korelasi di antara variabel independen (*predictor*) adalah

0.198 bagi variabel Instruksi, 0.200 bagi variabel Kosultasi, 0.170 bagi variabel Partisipasi, 0.245 bagi variabel Delegasi dan 0.949 bagi variabel Faktor Dana. Sebagai sesuatu nilai yang boleh menguji toleransi korelasi antara variabel predictor, nilai toleransi di antara 0 dan 1 dengan menggunakan asas penilaian bahwa “*the closer to zero the tolerance value is for a variable, the stronger the relationship between this and the other predictor variable*”. Nilai tolerance SPSS 0.0001 dan banyak pakar menetapkan nilai berkenaan pada 0.01. Dengan perkataan lain, sesuatu model regresi yang bebas daripada problem multikolineariti adalah mempunyai nombor *tolerance* mendekati 1 dan mempunyai nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) di sekitar angka 1. Hasil ujian di atas menunjukkan ternyata nilai *tolerance* sangat jauh daripada 0.01 atau mendekati 1. Hal ini bermakna bahwa melalui nilai *tolerance* ini boleh dipastikan bahwa tiada terdapat kolineariti di antara variabel predictor yang ada dalam model ini, kerana nilai *tolerance* semua variabel predictor berada jauh di atas 0.01.

Manakala nilai VIF ( $1/\textit{tolerance}$ ) bagi masing-masing variabel predictor adalah: 5.056 bagi variabel Gaya Instruksi, 4.990 bagi variabel Gaya Kosultasi, 5.874 bagi variabel Gaya Partisipasi, 4.074 bagi variabel Gaya Delegasi dan 1.054 bagi variabel Faktor Dana. Model regresi yang bebas daripada problem multikolineariti adalah mempunyai nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) di sekitar angka 1 mahupun lebih kecil daripada angka 5. Jika > 5 maka terdapat multikolineariti di antara variable predictor. Setelah melalui analisis sepertimana tabel di atas ternyata semua variable predictor mendekati angka 1 atau berada di bawah angka 5.

Dengan kata lain bahwa *The Variance Inflation Factor* (VIF) mengukur dampak dari collinearity antara variabel dalam model regresi. *The Variance Inflation Factor* (VIF) adalah  $1/\textit{Tolerance}$ , itu selalu lebih besar dari atau sama dengan 1. Tidak ada nilai VIF formal untuk menentukan adanya multikolinearitas. Nilai-nilai VIF yang melebihi 10 sering dianggap sebagai menunjukkan multikolinearitas, tetapi dalam model yang lebih lemah nilai di atas 2,5 dapat menjadi penyebab keprihatinan.

Hal ini menunjukkan makna bahwa semua variabel tidak memiliki problem multikolineariti. Oleh itu boleh diputuskan bahwa

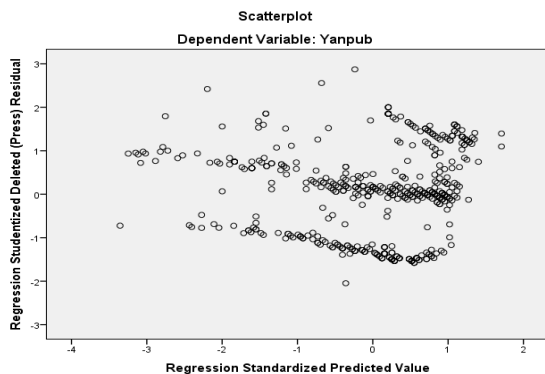


## Gaya Kepemimpinan Kepala Desa ...

semua variabel ini tidak mempunyai problem multikolinieriti dan boleh diteruskan kepada pembuatan ujian regresi.

### Ujian Homoskedastisiti

Ujian homoskedastisiti dibuat bagi mengetahui adakah dalam model yang digunakan terjadi ketidaksamaan (heteroskedastisiti) atau ketepatan (homoskedastisiti) varians residual dari sesuatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah bahawa ianya tidak memiliki heteroskedastisiti. Dari grafik terlihat bahwa titik menyebar secara rawak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar sama ada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. ini bermakna bahwa tidak terjadi heteroskedastisiti pada model regresi, sehingga model regresi boleh digunakan bagi memprediksi variabel bersandar (mutu Pelayanan publik) berdasarkan masukan dari variabel bebasnya.



**Grafik 1. Hasil Ujian Homoskedastisiti bagi Variabel Bebas**

### Ujian Normaliti dan lineariti

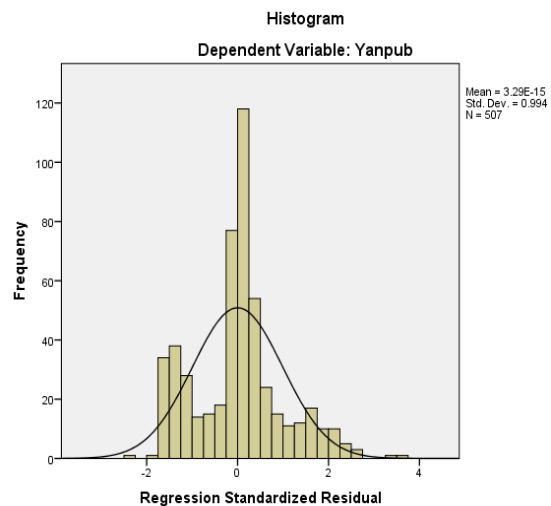
Ujian Normaliti dan linearity data merupakan persyaratan yang tidak boleh ditinggalkan bagi keperluan ujian regresi dan multi-regresi. Dalam kajian ini persyaratan klasik ini telah dibuat dengan menggunakan program SPSS *Kalmogorov - Smirnov Z*. keputusannya menunjukkan bahwa semua data variabel adalah normal dan linear, seperti terlihat dalam Grafik 2.

### Ujian Regresi

Hasil ujian regresi yang telah dibuat boleh dilihat pada tabel 7, bahwa hasil ujian tersebut antara lain mendapati tahap kesignifikan hubungan ke lima-lima variabel tidak bersandar tersebut terhadap mutu Pelayanan publik adalah 0.000 dengan *R Square* ( $R^2$ )

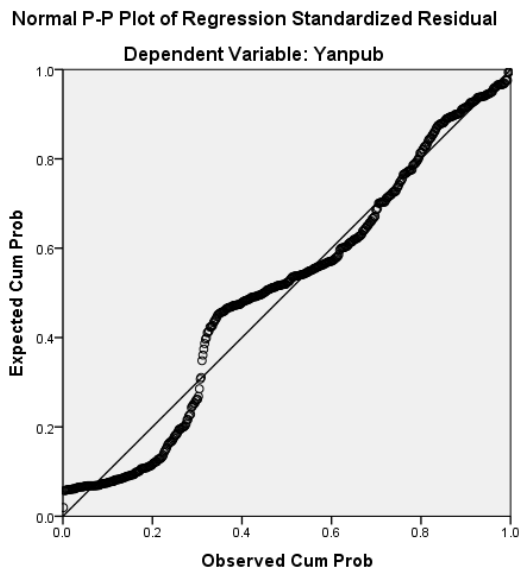
adalah 0.624 dan *adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0.620.

Dalam angka R sebanyak 0.790 dalam jadwal *Model Summary* menunjukkan bahwa korelasi di antara Mutu Pelayanan publik dan kelima-lima variable independenya adalah kuat kerana angka tersebut berada di atas 0.05. Sedangkan angka  $R^2$  (*R Square*) adalah sebanyak 0.624 dan angka *Adjusted R<sup>2</sup>* sebanyak 0.620. Hal ini bermakna bahwa 62% variasi daripada Mutu Pelayanan publik boleh dijelaskan oleh kelima-lima variabel independen tersebut. Dengan kata lain, terdapat sebanyak 62% mempunyai kontribusi secara bersama-sama daripada variabel independen yaitu, Gaya instruksi, Gaya partisipasi, Gaya konsultasi, Gaya delegasi dan Faktor dana ke atas variabel dependen yaitu Mutu Pelayanan publik, dan bakinya (38%) dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain.



**Grafik 2. Histogram Keluk Normaliti Data Kajian**

Grafik 3. Hasil Ujian Lineariti Data Kajian



Tabel 7. Hasil Ujian Regresi Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,790 <sup>a</sup>	,624	,620	6,75395

a. Predictors: (Constant), Dana, instruksi, delegasi, konsultasi, partisipasi

b. Dependent Variable: Yanpub

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	37960.928	5	7592.186	166.437	.000 <sup>b</sup>
Residual	22853.561	501	45.616		
Total	60814.489	506			

a. Dependent Variable: Pelayanan publik / Yanpub

b. Predictors: (Constant), Dana, instruksi, delegasi, konsultasi, partisipasi

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part Tolerance	VIF
(Constant)	9,456	2,011		4,701	,000				
instruksi	,369	,086	,2654	,300	,000	,750	,189	,118	,1985,056
konsultasi	,302	,086	,2153	,522	,000	,741	,155	,096	,2004,990
partisipasi	,216	,061	,2353	,542	,000	,748	,156	,097	,1705,874
Delegasi	,290	,118	,1362	,452	,015	,702	,109	,067	,2454,074
Faktor Dana	,015	,007	,0642	,261	,024	-,080	,100	,062	,9491,054

a. Dependent Variable: Pelayanan publik / Yanpub

Seterusnya, hasil ujian t sepertimana terlihat dalam tabel *Coefficients* di atas menunjukkan signifikansi konstanta dan setiap variable independen. Daripada hasil ujian t tersebut diputuskan bahwa: jika probability >

0.05 maka Ho diterima, dan jika probability < 0.05 maka Ho ditolak. Daripada tabel tersebut terlihat bahwa angka probability yang < 0.05 adalah semua variable independen. Sehingga dengan demikian boleh diputuskan bahwa

## Gaya Kepemimpinan Kepala Desa ...

variable gaya instruksi, variabel gaya konsultasi, variabel gaya partisipasi, variabel gaya delegasi dan variabel factor dana memang mempengaruhi Mutu Pelayanan publik.

Dengan  $df$  5/501 sebanyak 166.437 dengan taraf signifikansinya 0.000. maknanya adalah bahwa ianya boleh dipercayai sebanyak 99% bahkan boleh dipercayai 100%, kerana probability (0.000) lebih kecil daripada 0.05, maka model regresi boleh digunakan bagi memprediksi Mutu Pelayanan publik atau sebagai predictor ke atas Mutu Pelayanan publik. Maknanya adalah Gaya instruksi, Gaya delegasi, Gaya konsultasi, Gaya partisipasi dan Faktor dana secara bersama-sama mempengaruhi Mutu Pelayanan publik. Akan tetapi bagi mengetahui atau mengukur kekuatan pengaruh daripada masing-masing variabel independen tersebut ke atas variabel dependen (Mutu Pelayanan publik) boleh dilihat dalam tabel *Coefficients* regresi di atas. Daripada tabel tersebut terlihat bahwa kelima-lima variabel independen (*predictor*) tersebut mempunyai kekuatan pengaruh yang signifikan ke atas Mutu Pelayanan publik.

Seterusnya, hasil ujian  $t$  sepertimana terlihat dalam tabel *Coefficients* di atas menunjukkan signifikansi konstanta dan setiap variabel independen. Daripada hasil ujian  $t$  tersebut diputuskan bahwa: jika probability  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima, dan jika probability  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak. Daripada tabel tersebut terlihat bahwa angka probability yang  $< 0.05$  adalah semua variabel independen. Sehingga dengan demikian boleh diputuskan bahwa variabel gaya instruksi, variabel gaya konsultasi, variabel gaya partisipasi, variabel gaya delegasi dan variabel factor dana memang mempengaruhi Mutu Pelayanan publik.

### Pembahasan

Berdasarkan tugas pokok kepemimpinan kepala desa adalah melakukan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kepemimpinan kepala desa melakukan pembinaan kepada staf bawahan. Hubungan kepemimpinan kepala desa dengan staf bawahannya seyogyanya terjalin dengan baik terutama dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan mutu pelayanan publik kepada masyarakat desa.

Kepemimpinan kepala desa mempunyai tugas dan tanggungjawabnya untuk memberikan pelayanan masyarakat dengan cara menjalankan fungsi organisasi di tingkat desa. Gaya

kepemimpinan yang diterapkan oleh kepemimpinan kepala desa telah dilakukan dengan berbagai gaya kepemimpinan yang secara potensial telah diterapkan. Pada umumnya semua gaya kepemimpinan telah diterapkan oleh kepala desa dalam Kepemimpinannya. Gaya Kepemimpinan instruksi ( $r = .758$ ), gaya konsultasi, ( $r = .754$ ) gaya partisipasi ( $r = .780$ ) dan gaya delegasi ( $r = .733$ ). Gaya kepemimpinan tersebut telah diterapkan kepala desa berdasarkan kondisi dan kemampuan staf/bawahan desa pada waktu tugas pelayanan publik dilaksanakan. Fakta menunjukkan bahwa gaya partisipasi merupakan gaya kepemimpinan mempunyai korelasi yang lebih tinggi daripada gaya instruksi, konsultasi dan delegasi. Gaya partisipasi kepemimpinan mempunyai korelasi yang tinggi ( $r = .780$ ) dalam memberikan mutu pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kepemimpinan kepala desa. Gaya kepemimpinan partisipasi kepala desa memiliki korelasi yang paling tinggi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa. Dengan demikian maka gaya partisipasi yang diterapkan kepala desa merupakan gaya Kepemimpinan yang sudah umum dilaksanakan. Gaya kepemimpinan ini dilaksanakan kepala desa dengan cara mengikutsertakan staf dalam menyusun kebijakan dan memberi semangat untuk meningkatkan prestasi dalam melaksanakan tugasnya bahkan Kepemimpinan kepala desa membina dan mengajak kerjasama dalam melakukan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas dan memuaskan. Hal ini sesuai dengan gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Hersey & Blanchard (1992) antaranya adalah *Participating-Supporting* (mengikutsertakan, memberi semangat, kerja sama). Kepala desa dalam menghadapi tugas pekerjaan dilakukan saling bertukar Ide & beri kesempatan kepada staf untuk mengambil keputusan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa terjadi korelasi yang kuat antara gaya kepemimpinan situasional dari gaya instruksi, gaya konsultasi, gaya partisipasi dan gaya delegasi dengan mutu pelayanan public. Hal ini dibuktikan oleh angka  $R$  sebanyak 0.790 (jadwal *Model Summary*) tersebut di atas menunjukkan bahwa korelasi di antara Mutu Pelayanan publik dan kelima-lima variabel bebasnya adalah kuat kerana angka tersebut berada di atas 0.05.

Berdasarkan hasil uji  $t$  bahwa variabel gaya instruksi, variabel gaya konsultasi, variabel

gaya partisipasi, variabel gaya delegasi dan variabel factor dana memang mempengaruhi Mutu Pelayanan publik. Hasil uji t ini menunjukkan bahwa ke lima variable independen tersebut telah mempengaruhi mutu pelayanan public. Kepemimpinan kepala desa yang memberikan pelayanan kepada warga menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi dan kesiapan dan kemampuan staf yang membantu pimpinan. Gaya kepemimpinan apapun yang diterapkan ketua desa dalam memberikan pelayanan kepada warganya memberi pengaruh terhadap mutu pelayanan bagi warganya.

Selanjutnya berdasarkan uji *F* dengan df 5/501 sebanyak 166.437 dengan taraf signifikansinya 0.000. bahwa dapat dipercayai sebanyak 99% bahkan boleh dipercayai 100%, kerana probability (0.000) lebih kecil daripada 0.05, Dengan demikian dapat dikatakan adalah bahwa Gaya instruksi, Gaya delegasi, Gaya konsultasi, Gaya partisipasi dan Faktor dana secara bersama-sama mempengaruhi Mutu Pelayanan publik. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa semua gaya kepemimpinan apapun yang diterapkan oleh kepala desa mempunyai pengaruh terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepada warganya di desa. Demikian pula dana yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat sangat memberikan pengaruh sehingga pelayanan yang diterima warga desa merasakan menerima manfaatnya bagi kepentingan sosial ekonomi mereka.

Sedangkan angka  $R^2$  (*R Square*) adalah sebanyak 0.624 dan angka *Adjusted R<sup>2</sup>* sebanyak 0.620. Hal ini berarti bahwa 62% variasi daripada Mutu Pelayanan publik boleh dijelaskan oleh pengaruh kelima-lima variabel independen tersebut. Dikatakan bahwa sebanyak 62% merupakan kontribusi secara bersama-sama yang dijelaskan oleh variabel independen yaitu, Gaya instruksi, Gaya delegasi, Gaya konsultasi, Gaya partisipasi dan Faktor dana terhadap variabel dependen Mutu Pelayanan publik, dan sisanya (38%) adalah dijelaskan oleh variabel yang lain. Dengan perkataan lain boleh dijelaskan bahwa *koefisien determinasi* menunjukkan semua gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala desa mempunyai pengaruh terhadap mutu pelayanan yang diterima oleh warga desa, sehingga mereka menerima pelayanan tersebut sebagai warga desa memperoleh pelayanan dari kepemimpinan dari kepala desa mereka sendiri.

### Simpulan

Pada umumnya semua gaya kepemimpinan telah diterapkan oleh kepala desa dalam Kepemimpinannya. Namun dalam praktek kepemimpinan kepala desa menunjukkan bahwa gaya partisipasi merupakan gaya kepemimpinan mempunyai korelasi yang lebih tinggi daripada gaya instruksi, konsultasi dan delegasi. Gaya partisipasi kepemimpinan mempunyai korelasi yang tinggi ( $r = .780$ ) dalam memberikan mutu pelayanan kepada masyarakat oleh kepemimpinan kepala desa. Gaya kepemimpinan partisipasi kepala desa memiliki korelasi paling tinggi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa. Maka gaya partisipasi yang diterapkan kepala desa merupakan gaya Kepemimpinan yang sudah umum dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada warga desa secara bermutu dan memuaskan.

Dikatakan bahwa sebanyak 62% merupakan kontribusi secara bersama-sama yang dijelaskan oleh variabel independen iaitu, Gaya instruksi, Gaya konsultasi, Gaya partisipasi, Gaya delegasi, dan Faktor dana terhadap variabel dependen Mutu pelayanan publik, Dengan perkataan lain dapat dijelaskan bahwa *koefisien determinasi* menunjukkan semua gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala desa mempunyai pengaruh terhadap mutu pelayanan, sehingga dengan pelayanan tersebut sebagai warga desa memperoleh pelayanan umum dari kepemimpinan kepala desa mereka sendiri.

Kepemimpinan kepala desa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan desa mempunyai hubungan yang kuat dengan pemberian tugas pelayanan kepada masyarakat. Hubungan kepemimpinan kepala desa tersebut memiliki hubungan yang kuat dari semua gaya kepemimpinan yang mencakup gaya instruksi, konsultasi, partisipasi dan delegasi. Pelaksanaan pelayanan masyarakat desa dipengaruhi oleh Kepemimpinan dari kepala desa. Pengaruh kepemimpinan terhadap mutu pelayanan tersebut diperlukan gaya kepemimpinan tertentu untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. Gaya Kepemimpinan yang diterapkan kepala desa mengikuti kematangan bawahan. Kerana itu peningkatan pelaksanaan mutu pelayanan publik berhubungkait dengan kematangan staf dari gaya kepemimpinan yang diterapkan kepemimpinan kepala desa.

Gaya kepemimpinan yang diterapkan mengikuti kematangan bawahan. Penerapan

### ***Gaya Kepemimpinan Kepala Desa ...***

gaya kepemimpinan Kepala Desa yang memberikan pelayanan masyarakat desa di Kab. Indragiri Hilir mengikuti perspektif situational leadership yang meletakkan hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kematangan bawahan.

#### **Rujukan**

- Dwiyanto, Agus. 1995. **Penilaian Prestasi Organisasi Publik**. Yogyakarta: Fisipol Universitas Gajah Mada.
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. 1993. **Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources**. (6 th ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- , 1996. **Manajemen Perilaku Organisasi, Pendayagunaan Sumber Daya Manusia**. Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. **Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi**. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Ridwan, Juniarso, Cs. 2010. **Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik**. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. **Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan**. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Siagian, P. Sondang. 1989. **Teori dan Praktek Kepemimpinan**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sanusi. Ahmad, dan Sobary Sutikno. 2009. **Kepemimpinan Sekarang dan Masa Depan**. Bandung: Penerbit Prospect.
- Tjiptono, Fandy. 2012. **Service Management: Mewujudkan Layanan Prima**. Penerbit Andi.
- Wayan, I Suarjaya. 2007. **Analisis Pelayanan Publik Desa Dinas dan Desa Pekraman Wongaya Gede Kabupaten Tabanan**. Jakarta: Disertasi Program Pasca Sarjana UI.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *pelayanan publik* Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik*